

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kaderisasi politik di DPD PSI Kota Semarang tidak memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan lolosnya caleg perempuan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa DPD PSI Kota Semarang berada dalam kondisi yang ambivalen, yakni di satu sisi memiliki struktur formal yang relatif sistematis, namun di sisi lain dalam praktiknya masih sangat dipengaruhi oleh dinamika momentum politik dan konsolidasi organisasi yang belum sepenuhnya stabil. Secara normatif, PSI memiliki jenjang kaderisasi berlapis sebagaimana diatur dalam AD/ART. Akan tetapi, dalam implementasinya di tingkat daerah, kaderisasi lebih dipahami sebagai proses bertahap lima tingkat (tunas, dasar, madya, paripurna, dan istimewa) dengan penekanan kuat pada doktrinasi nilai partai pada tahap awal dan penguatan kapasitas manajerial serta kepemimpinan pada tahap lanjut. Perbedaan antara desain formal dan praktik aktual ini menunjukkan adanya jarak antara institusionalisasi aturan dengan internalisasi di level pelaksana.

Lebih jauh, kaderisasi di DPD PSI Kota Semarang menunjukkan karakter yang kontekstual sekaligus situasional. Kontekstual karena terdapat penyesuaian materi berdasarkan persoalan lokal yang mengindikasikan adanya fleksibilitas kurikulum. Namun sekaligus situasional karena intensitas pendidikan politik dan pelatihan cenderung meningkat menjelang momentum elektoral. Pola ini memperlihatkan bahwa kaderisasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme

pembentukan kader jangka panjang, melainkan masih berkorelasi kuat dengan kebutuhan elektoral. Dengan demikian, orientasi penguatan kapasitas kader belum sepenuhnya terlepas dari logika kontestasi.

Bagi calon anggota legislatif perempuan, kaderisasi ini menghadirkan pengalaman yang relatif suportif secara interpersonal, tetapi belum sepenuhnya responsif secara struktural. Dukungan senior, ruang konsultasi, dan jejaring internal menjadi modal sosial yang signifikan bagi mereka. Namun, materi dan sistem pembekalan masih bersifat umum dan belum secara spesifik dirancang untuk menjawab kebutuhan politik perempuan, terutama dalam menghadapi beban ganda domestik maupun resistensi sosial di lapangan. Hambatan yang muncul, misalnya manajemen waktu keluarga hingga penolakan berbasis usia dan gender, menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan semata persoalan kapasitas individual, melainkan terkait dengan struktur sosial dan budaya politik lokal.

Di sisi lain, keterbukaan rekrutmen yang menjadi identitas partai membawa konsekuensi ambivalen. Ia memperluas akses partisipasi politik, tetapi sekaligus melemahkan fungsi seleksi ideologis dan konsistensi kaderisasi. Minimnya sanksi dan longgarnya mekanisme disiplin memperlihatkan bahwa partai masih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan koersif, yang di satu sisi menjaga inklusivitas, tetapi di sisi lain berpotensi menghambat konsolidasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, sistem kaderisasi DPD PSI Kota Semarang dapat dipahami sebagai sistem yang sedang dalam proses institusionalisasi. Ia telah memiliki kerangka formal, nilai ideologis, serta praktik pelatihan berjenjang,

namun belum sepenuhnya terlembaga secara stabil dan konsisten. Bagi caleg perempuan, kaderisasi ini menyediakan ruang masuk dan dukungan sosial, tetapi belum sepenuhnya mentransformasikan hambatan struktural yang mereka hadapi dalam arena politik. Sehingga kaderisasi di tingkat daerah tidak hanya mencerminkan desain organisasi partai, tetapi juga memperlihatkan bagaimana institusi politik baru bernegosiasi dengan realitas sosial, dinamika elektoral, dan relasi gender dalam praktik politik lokal.

4.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan dari penelitian terkait dinamika sistem kaderisasi di DPD PSI Kota Semarang, penelitian ini memberikan argumen logis baik secara teoritis ataupun praktis yang diejlaskan sebagai berikut:

4.2.1 Implikasi Teoritis

Apabila dilihat secara teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan bahwa kebijakan *affirmative action* yang dijelaskan dalam undang-undang terkadang hanya sekedar administrasi saja. Peraturan tersebut tidak menyentuh variabel substantif dalam internal partai. Temuan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa tingginya angka keterwakilan perempuan di daftar calon legislatif (DCT) tidak langsung mencerminkan keberhasilan sistem kaderisasi yang terstruktur. Pada penelitian ini juga menggambarkan bahwa partai yang bertipe inklusif dan terbuka seperti PSI sedangkan pada sisi lain tidak adanya kurikulum baku dan jenjang kaderisasi yang ketat akan melemahkan posisi partai tersebut. Hal tersebut terjadi karena partai hanya fokus kepada kapasitas individu saja. Dengan bukti tersebut,

terdapat kesenjangan antara teori fungsi partai politik yang seharusnya berguna sebagai sarana rekrutmen dan pendidikan politik. Namun, pada kenyataannya di lapangan banyak anggota partai yang cenderung pragmatis dan melakukan pelatihan ketika terdapat momentum politik saja.

4.2.2 Implikasi Praktis

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini secara praktis menjelaskan bahwa pola kaderisasi yang cenderung fleksibel dan tidak adanya sanksi mengikat akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan sebuah organisasi. DPD PSI Kota Semarang adalah salah satu contohnya yang menerapkan kaderisasi fleksibel dan tidak ada sanksi mengikat. Dampak yang mereka terima berupa kerentanan terhadap loyalitas dan kualitas kader di masa depan. Memang pada Pemilu 2024 DPD PSI Kota Semarang telah memenangkan tiga caleg perempuan, tetapi tiga caleg perempuan tersebut menang dikarenakan dorongan dari modal sosial individu dan kerja kolektif antar anggota. Apabila hal ini terjadi, menandakan bahwa partai masih mengandalkan figur perorangan.

Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa ketiadaan materi yang langsung menuju gender atau keperempuanan akan berdampak kepada ketidakpastian partai dalam menyiapkan kadernya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian bahwa ketika seorang kader turun ke lapangan masih terdapat banyak stigma yang diberikan kepada kader perempuan. Jika sistem pelatihan yang diberikan masih bersifat umum bahkan daring tanpa pendampingan yang intensif, maka akan sangat berisiko bagi PSI. Mereka akan kehilangan kader perempuan yang militan karena tidak adanya ikatan emosional dan ideologis yang kuat.

4. 3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat celah dan kekurangan dalam pengerjaan. Keterbatasan tersebut akan disampaikan karena hal tersebut adalah tanggung jawab secara akademis. Selain itu untuk memberikan batasan ruang lingkup agar hasil penelitian ditempatkan pada konteks yang tepat.

4.3.1 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak adanya kurikulum kaderisasi baku di DPD PSI Kota Semarang, bahkan hingga tingkat pusat dikarenakan PSI lebih menekankan pada fleksibilitas di tengah segala keterbatasan sebagai partai muda. Selanjutnya, keterbatasan penelitian yang kedua ialah sulitnya memisahkan secara tegas antara pengaruh dari sistem kaderisasi dengan modal individual kader dalam mencapai kesuksesan di Pemilu 2024. Hal ini membuat keberhasilan tidak bisa sepenuhnya diklaim sebagai hasil dari sistem kaderisasi, karena juga melibatkan faktor-faktor individual yang kompleks.

4.3.2 Saran Penelitian Selanjutnya

1. DPD PSI Kota Semarang untuk segera merancang sistem kaderisasi yang meliputi rekrutmen awal, kurikulum dan silabus, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang sistematis, terstruktur, dan rigid tanpa harus mengorbankan hilangnya karakter partai PSI sebagai partai inklusif.
2. DPD PSI Kota Semarang perlu untuk menerapkan sistem kaderisasi yang lebih sensitif gender dalam membina kader-kader perempuan dan memaksimalkan potensi mereka. Hal ini demi mendorong partisipasi perempuan dari DPD PSI Kota

Semarang secara kualitas, tidak hanya sebagai token dan memenuhi syarat kuantitas tertentu.